

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo

BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Pemprov Sabet 7 WTP Berturut-turut

Paris Ingatkan Tindak Lanjut Rekom BPK

PUNCAK ROTU -GP- Pemprov Gorontalo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan 2019. Dengan demikian, Pemprov Gorontalo telah berhasil mendapatkan opini WTP "kali secara berturut-turut dari BPK.

Ini terungkap setelah BPK-RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Gorontalo 2019, dalam rapat paripurna Deprov yang dilaksanakan secara virtual, kemarin (4/6).

Anggota VI BPK-RI, Prof. Haris Azhar Azis yang menyampaikan hasil audit BPK menjelaskan, proses audit didasarkan pada empat kriteria. Yaitu, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan.

"Setelah melakukan audit kami memberikan opini WTP. Kita beri apresiasi secara khusus, karena dengan capaian ini Pemprov sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP" ujarnya.

Menanggapi hasil ini, Ketua Deprov Gorontalo Paris Jusuf menyatakan, pihaknya ikut merasa bangga dengan capaian ini. Karena makin meneguhkan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo telah berjalan dengan disiplin dan sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi pemerintahan. "Sehingga mencerminkan pengelolaan keuangan telah berjalan secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Meski begitu, Paris

Jusuf mengingatkan Pemprov Gorontalo untuk bisa menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan. Karena dalam penyampaiannya ada sejumlah catatan yang harus perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov dalam kurun waktu 60 hari terhitung sejak LHP diserahkan.

"Sehingga akan lebih memaksimalkan pengelolaan keuangan dan membuka peluang bagi Pemprov untuk bisa mempertahankan opini WTP pada tahun depan," tandasnya.

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK berkaitan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Pemprov. Pertama menyangkut program Mahyani, pengelolaan aset, kelebihan pembayaran gaji, kegiatan perjalanan dinas, serta terkait dengan belanja modal. (rmb)